

DISUSUN, PETA JALAN PANDEMI MENUJU ENDEMI

DIY Dorong Pemasangan QR Code PeduliLindungi

YOGYA (KR) - Pemda DIY melalui Satpol PP DIY terus mendorong tempat-tempat publik seperti mal, supermarket, dan hotel untuk memasang QR Code PeduliLindungi. Selain melakukan sosialisasi dan edukasi, Satpol PP DIY juga melakukan pengawasan terkait pengaplikasian QR Code tersebut.

Ada empat kriteria dalam PeduliLindungi, yakni hijau untuk mereka yang sudah dua kali vaksin dan tidak ada catatan kontak erat, kuning bagi mereka yang mendapatkan satu kali vaksin atau penyintas Covid-19, merah untuk yang belum divaksinasi, dan hitam bagi mereka yang positif Covid-19 atau kontak erat dengan pasien Covid-19.

“Terus terang dari hasil pengawasan sementara, tingkat penerapan aplikasi PeduliLindungi di pusat perbelanjaan masih belum maksimal karena berada di angka 88,6 persen. Hal itu karena penggu-

naan aplikasi PeduliLindungi tidak bisa diaplikasikan di tempat yang tidak terjangkau jaringan internet. Misalnya di basement pusat perbelanjaan. Padahal PeduliLindungi wajib diterapkan di seluruh pintu masuk mal untuk keperluan skrining pengunjung maupun pegawai,” ujar Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY Noviar Rahmad di kantornya, Rabu (15/9).

Noviar menyatakan, aplikasi PeduliLindungi sangat penting, karena itu pemilik usaha diminta segera mengurus QR Code. Sebab tanpa ada QR Code mereka akan kesulitan mengakses aplikasi tersebut. Saat ini aplikasi PeduliLindungi sudah diterapkan di semua mal di DIY. Pihaknya akan memastikan pengelola mal telah memasang papan pengumuman anak usia 12 tahun ke bawah tidak bisa masuk mal serta wajib menyediakan tempat cuci tangan, dan pengukuran suhu tubuh.

Sementara itu Pemerintah bergerak cepat menyusun peta jalan transisi dari pandemi menuju endemi, guna mengendalikan laju penularan Covid-19 dan mengembalikan aktivitas masyarakat secara normal. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan, langkah awal bagi masyarakat adalah dengan menyegerakan vaksinasi, mendisiplinkan kebiasaan mematuhi protokol kesehatan, dan menjaga kesehatan tubuh dengan gaya hidup sehat.

Menkominfo mengatakan, Covid-19 diprediksi tidak hilang dalam waktu cepat. Karena itu, Pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk beradaptasi dan mengadopsi kebiasaan-kebiasaan baru agar dapat hidup sehat berdampingan dengan Covid-19. Peta jalan (road map) dimaksud merupakan dasar tatanan hidup baru bagi masyarakat dalam transisi pandemi menjadi endemi.

(Ria/Ira/San)-d

Upayakan

panen jagung, stok jagung itu dikeluarkan dan harga stabil,” kata Suparman.

Pertemuan itu diikuti sejumlah perwakilan peternak, yakni Ketua Pinsar Petelur Nasional Yudianto Yosgiarso, Ketua Koperasi Putera Blitar Sukarman, Ketua Paguyuban Peternak Rakyat Nasional (PPRN) Rofi Yasifun. Kemudian peternak ayam petelur asal Blitar Suroto, yang membentangkan spanduk atau poster mengenai harga pangan jagung saat kunjungan kerja Presiden Jokowi di Blitar.

Mentan Syahrul Yasin Limpo mengatakan, ada tiga hal yang disampaikan perwakilan peternak kepada Presiden, yakni

berkait persoalan budidaya atau bibit ayam petelur, pakan bagi ayam petelur berupa jagung yang cenderung naik harganya, dan harga telur yang saat ini sangat rendah.

Menurut Mentan, Presiden meminta Mentan dan Mendag melakukan langkah cepat pekan ini agar kebutuhan jagung, khususnya di tiga tempat yaitu Klaten, Blitar dan Lampung, bisa tertangani dengan harga yang sangat normatif dan jika perlu menggunakan subsidi-subsidi tertentu untuk tiga daerah sentra tersebut.

Presiden juga memerintahkan Mentan dan Mendag memastikan agar dinamika harga jagung stabil. Sentra jagung ada di

mana-mana, namun distribusinya perlu dipermudah bagi peternak. Selain itu, perlu regulasi yang bisa melindungi peternak.

Mendag Muhammad Lutfi menyatakan, pihaknya sedang mengupayakan agar harga pakan jagung untuk peternak dapat turun menjadi Rp 4.500/kg. “Ini akan kita kasihkan kepada jagung, supaya jagungnya bisa sesuai dengan batasan dari Kementerian Perdagangan yaitu harga jagung di Rp 4.500,” kata Lutfi.

Lutfi mengakui, terjadi ketidakseimbangan dalam industri perunggasan domestik karena tingginya harga pakan berupa jagung dan gandum.

Sambungan hal 1

Bukan

Pemda yang dinilai dan tercermin dalam indikator kinerja utama Gubernur DIY dalam RPJMD yang disebutkan muara opininya bisa dicapai dengan WTP tersebut.

“Secara implisit tertuang dalam Misi Gubernur DIY yaitu pertama eksternal tentang kehidupan perkehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. Kedua terkait tata kelola pemerintahan salah satunya dengan opini WTP serta Sistem Akuntabilitas Instansi Kinerja Pemerintah (SAKIP), dimana diketahui Pemda DIY berhasil meraih predikat AA selama tiga tahun berturut-turut,” tandasnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY ini mengakui, tantangan yang dihadapi Pemda DIY semakin besar, seiring menguatnya keterbukaan transparansi publik sehingga semua masyarakat bisa melihat apa yang akan, telah dan yang sesungguhnya dipertanggungjawabkan. Maka korelasi apa dilakukan dengan yang dipertanggungjawabkan tersebut terhubung, sehingga menjadi tantangan luar biasa yang harus

dilaporkan dan sesuai fakta serta data yang diperoleh. Cara BPK menilai kinerja Pemda sangat independen sehingga menjadi tantangan bagi Pemda DIY untuk memperkuat dan terbuka lagi agar bisa memperoleh kembali opini WTP.

Kabid Akuntansi BPKA DIY Endrawati Utami mengatakan, keberhasilan Pemda DIY memperoleh opini WTP dari BPK 11 kali berturut-turut tidak lepas dari komitmen pimpinan dalam hal ini Gubernur DIY Sri Sultan HB X. Opini WTP merupakan salah satu indikator kinerja utama Gubernur, dari komitmen untuk mewujudkan target kinerja yang dilakukan dari bidang akuntansi. Pertama, memfasilitasi sistem informasi keuangan dalam hal ini aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan (SIMPEL). Aplikasi SIMPEL terintegrasi mulai dari penganggaran, penatausahaan dan pelaporan. Dengan begitu diharapkan bisa membantu pengelolaan akuntansi di semua OPD dalam penyusunan laporan keuangan.

Kedua, meningkatkan kualitas SDM pe-

ngelola akuntansi lewat pendampingan seperti Bimtek, workshop serta penyempurnaan regulasi yang belum sesuai dengan mengacu regulasi terbaru.

“Terkait pelaporan keuangan tahun 2021 ini, ke depan kami berharap opini WTP tetap bisa dipertahankan. Apalagi dengan adanya sistem informasi baru yang diterapkan Pemerintah. Kami BPKA DIY tetap berupaya untuk mendampingi semua OPD dengan aplikasi pendamping SIMPEL yang diharapkan dapat membantu tugas akuntansi dan pelaporan semua OPD untuk penyajian laporan keuangan yang lebih baik,” ujar Endrawati.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, pandemi Covid-19 telah mengakibatkan krisis kemanusiaan dan kesehatan yang mengubah kehidupan sosial ekonomi serta berimplikasi bagi keuangan negara. Pemerintah telah menetapkan Undang Undang No 2 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dalam menghadapi pandemi Covid-19.

(Ira/Ria)-d

Sambungan hal 1

Karnaval

Dengan piranti cat semprot, cat tembok dan kuas, mereka menorehkan curhat visual yang membelenggunya. Pesan verbal-visual bermuansa politik, sosial dan ekonomi menjadi materi komunikasi visual yang digoreskannya di ruang publik.

Berdasarkan realitas sosial di atas, frasa karnaval tanda visual (KTV) layak disematkan. Keberadaan KTV memanfaatkan reputasi baik dari popularitas seni visual jalanan. Wujudnya antara lain: mural, *wheat-paste* (poster dinding) dan grafiti. Keberadaan jejak visual KTV menyimpan daya ganggu tinggi di ruang publik.

Mengapa diberi nilai bermuansa negatif? Karena jejak visual KTV berhasil menarik perhatian para pihak yang melihatnya. Ujungnya, representasi pesan verbal-visual KTV menyebabkan warganet dan warga masyarakat terbelah dalam dua kubu saling bertentangan.

Kelompok pro KTV merasa aspirasinya berhasil diungkapkan secara *gambang* di ruang publik. Bagi penderita luka batin akibat menjadi korban peradaban politik dan ekonomi serasa mendapatkan obat yang *cepleng*. Bagi pihak yang bertentangan, kehadiran KTV dianggap mengganggu estetika kota, ekologi visual dan kemerdekaan visual warga. Mereka melaporkan kepada pihak berwajib untuk mengkondisikan KTV yang divonis memunculkan gangguan visual di ruang publik.

KTV dalam konteks seni visual jalanan sekarang menjelma menjadi sebutuk karya komunikasi visual yang dipertontonkan di ruang publik. Makna atas pesan verbal-visual yang direkatkan di dalam tubuh seni visual jalanan, suka tidak suka, memasuki wilayah bebas tafsir.

Fenomena pro-kontra kehadiran KTV, sejatinya bersumber pertarungan antartanda. Semuanya bermuara pada kondisi multiinterpretasi serta keberagaman pemahaman makna. Dampaknya, para pihak merasa paling benar atas tanda dan makna yang dilemparkan di ruang publik. Mereka juga merasa memiliki hak menjadi polisi visual. Mereka seakan-akan mengemban tugas negara untuk menimpa bahkan menghapus pesan verbal-visual yang dianggap tidak layak dibentangkan di ruang publik.

Munculnya fenomena pro-kontra KTV menghadirkan permasalahan komunikasi visual yang harus segera dicarikan jalan keluarnya. Akar masalahnya, pertama terjadi perkelahian tanda visual yang dilemparkan sang komunikator. Lawannya, siapapun yang melihat dan memberi makna atas karya seni visual jalanan. Kedua, terjadi pelepasan konteks terkait makna atas tanda visual. Pada titik ini, konteks yang dihadirkan sang komunikator memasuki wilayah bebas konteks. Dampaknya, mereka diserang penyakit komunikasi mengenkan. Namanya miskomunikasi.

Bagaimana cara mengobatinya? Resepnya, semua pihak harus rela menyepakati konstruksi konteks. Dari sana, virus miskomunikasi akan meninggalkan akal pikiran serta nalar perasaan penderita miskomunikasi. Resep itu diyakini sanggup mengatasi kegaduhan visual.

Dulu, pendekatan semacam ini menjadi jejak peradaban yang digoreskan seniman visual jalanan. Dulu, ketika seni visual jalanan belum diselewangkan menjadi media caci maki. Kehadirannya didedikasikan demi kejayaan ekspresi seniman yang dipamerkan di galeri terbuka. Tempat itu bagaikan kanvas terbuka yang mampu mewadahi geliat ekspresi seni visual jalanan.

Agar mendapatkan penilaian layak pajang di galeri terbuka, seniman visual jalanan menghadirkan tema beragam. Dulu, semua jejak visual seni jalanan di ruang publik senantiasa dikemas dalam balutan karya seni visual yang *nyeni, ngartistik*, unik dan lucu.

Mereka sengaja menempatkan karya seni visual jalanan menjadi dekorasi kota. Mereka juga menjadi komunikator visual. Bertugas menyampaikan pesan verbal-visual yang memberikan kebermanfaatn kepada warga. Mereka secara sadar menghindari perbuatan tidak terpuji yang mengakibatkan munculnya penyakit miskomunikasi dan caci maki. *(Penulis adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta)-d*

Sambungan hal 1

TARGET VAKSINASI TERPENUHI

Menkes: Pembatasan Asing Dilonggarkan

JAKARTA (KR) - Presentase vaksinasi setidaknya untuk dosis pertama sebanyak 70 persen dari jumlah populasi, sudah tercapai,Indonesia berencana secara bertahap membuka perbatasan negara untuk warga negara asing, kedatangan dari luar negeri ke Indonesia jumlahnya lebih banyak dari warga negara Indonesia yakni pekerja migran asal Indonesia.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan, jika dibandingkan dengan warga negara asing, kedatangan dari luar negeri ke Indonesia jumlahnya lebih banyak dari warga negara Indonesia yakni pekerja migran asal Indonesia.

“WNI, pegawai migran asal Indonesia yang ternyata di negara asalnya tidak semua divaksin. Mungkin mereka juga tempat tesnya, mungkin bukan tempat tes yang baik,” ujar Menkes Budi, dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR, dikutip dari akun chanel Youtube DPR RI, Rabu (15/9).

Setelah menjalani tes entry yang diterapkan pemerintah Indonesia di berbagai pintu-pintu

masuk. Sebagian besar pekerja migran Indonesia dari luar negeri tersebut, menunjukkan hasil tes positif Covid-19. Hal ini membuat Kemenkes bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri RI, untuk melakukan kurasi laboratorium tempat pemeriksaan tes swab PCR.

“Bekerja sama dengan Kemenlu dan sekarang lagi mendekati seluruh negara-negara yang banyak pekerja migran asal Indonesia untuk melakukan pemilihan lab mana yang boleh kita pakai untuk tes PCR bagi pekerja migran Indonesia yang ingin datang ke Indonesia,” jelas Menkes Budi.

Mengkurasi mana saja laboratorium tempat pemeriksaan tes swab PCR yang bisa dipakai untuk memeriksa para pekerja migran Indonesia dari luar negeri saat masuk ke Indonesia ini, dikatakan Menkes Budi ia sengaja tiru dari pemerintah China dan pemerintah Korea Selatan yang memberlakukan peraturan yang sama dalam hal kedatangan dari luar negeri.

(Ati)-f

Presiden

PP No 94/2021, Rabu (15/9).

Dalam PP itu Pasal 5 huruf n berbunyi, PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, kepala daerah/wakil kepala daerah, anggota DPR, anggota DPD atau DPRD. Disebutkan pula bentuk-bentuk dukungan yang dilarang. Antara lain, ikut kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengenakan PNS lain, sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.

Selain itu, mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pa-

sangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat dan/atau memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Tanda Penduduk (SKTP).

Pada pasal berikutnya, diatur pula hukuman disiplin bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan tersebut. Tingkat dan jenis hukuman disiplin yang diberikan mulai dari sedang sampai berat, berupa pemotongan tunjangan kinerja, penurunan jabatan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

(Obi)-d

KPK

Untuk itu, tegasnya, enam orang pegawai ini tidak bisa diangkat menjadi ASN dan diberhentikan dengan hormat per tanggal 30 September 2021. “Jadi, jumlah pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebanyak 56 orang karena satu orang telah memasuki masa purnabakti sejak Mei 2021,” ujar Marwata, Rabu (15/9).

Ia mengungkapkan, pemberhentian dengan hormat itu berdasarkan keputusan rapat koordinasi (rakor) yang dihadiri Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Kepala Badan

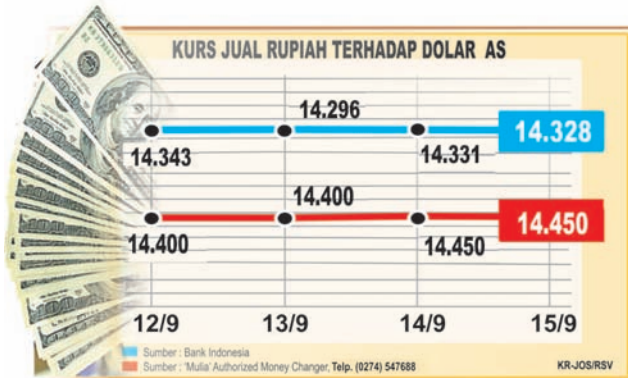
Kepegawaian Negara (BKN) serta lima Pimpinan KPK bersama Sekretaris Jenderal, Kepala Biro Hukum dan Pit Kepala Biro SDM KPK pada 13 September 2021 di Gedung BKN Jakarta.

Berdasarkan keputusan rakor itu, kata Marwata, KPK akan mengangkat dan melantik 18 orang pegawai KPK yang telah mengikuti dan lulus diklat bela negara dan wawasan kebangsaan. Selain itu, memberi kesempatan kepada tiga orang pegawai KPK yang baru menyelesaikan tugas dari luar negeri untuk mengikuti asesmen TWK yang dimulai pada 20 September 2021.

Seperti diberitakan, KPK sebelumnya bekerja sama dengan BKN melaksanakan TWK pada 18 Maret sampai 9 April 2021 kepada 1.351 pegawai. Hasilnya, pegawai yang memenuhi syarat sebanyak 1.274 orang, pegawai yang tidak memenuhi syarat 75 orang, pegawai yang tidak hadir 8 orang dengan alasan sedang melaksanakan tugas belajar di luar negeri tiga orang, pensiun satu orang, mengundurkan diri dua orang, diberhentikan satu orang dan tanpa keterangan satu orang.

Pegawai yang dinyatakan memenuhi syarat telah diangkat, disumpah dan dilantik menjadi ASN pada 1 Juni 2021 sebanyak 1.271 pegawai. Sedangkan, pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat melalui koordinasi dengan Kemenpan RB, BKN, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Kemenkumham diberi kesempatan untuk memenuhi syarat melalui diklat bela negara.

(Ful)-d



Prakiraan Cuaca				Kamis, 16 September 2021		
Lokasi	Cuaca				Suhu °C	Kelembaban
	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari		
Bantul					22-30	70-95
Sleman					20-28	70-95
Wates					22-30	70-95
Wonosari					22-30	70-95
Yogyakarta					23-30	70-95
 Cerah	 Berawan	 Udara Kabur	 Hujan Lokal	 Hujan Petir	 Arko	

Grafis : Arko

Pentingnya Penggunaan Internet Sehat pada Anak-anak



Kartika Sari Yudaningsih, S.I.Kom., M.A

HIMBAUAN dari pemerintah dan adaptasi kebiasaan baru sebagai upaya menghentikan laju penyebaran Covid-19 terus dilakukan, diantaranya adalah dengan tidak bepergian atau #dirumahaja dan proses belajar atau bersekolah secara daring. Semua siswa dari PAUD hingga mahasiswa melaksanakan proses belajar mengajar secara daring demi ikut mendukung pemerintah dalam menurunkan penularan virus.

Anak-anak menjadi lebih banyak terpapar layar *smartphone*. Tidak jarang kemudian sebagian besar anak-anak leluasa mengakses internet melalui *smartphone* tanpa adanya pendampingan dari orang tua. Padahal, anak-anak khususnya yang berada si rentang usia 2-7 tahun belum memiliki kompetensi untuk mengatur dan melindungi diri dari berbagai pengaruh buruk *smartphone*. American Academy Pediatrics memberikan rekomendasi durasi layar pada anak-anak tidak lebih dari 2 jam, dan hal tersebut tidak dilakukan secara terus menerus.

Warga di Dukuh Dawung, Desa Sawit, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah merupakan salah satu desa yang mendapat kemudahan dalam

mengakses informasi, baik melalui televisi, maupun dengan internet. Namun hal ini belum diimbangi dengan pengawasan dan perhatian para orang tua terkait penggunaan internet sehat pada anak-anak.

Ada sebuah peribahasa dari Amerika yang berbunyi: “It takes a village to raise a child”. Peribahasa tersebut dapat diartikan bahwa seluruh masyarakat memiliki peran dan pengaruh, serta berinteraksi dengan anak-anak agar anak-anak tersebut dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat. Tentu saja interaksi yang dimaksud adalah interaksi yang baik, yang dapat membentuk karakter dan kebiasaan baik bagi anak-anak. Dalam hal ini, saya melihat bahwa dalam mendidik anak, kita tidak dapat berjalan



sendiri. Dibutuhkan kekompakan dari berbagai pihak, termasuk dengan warga masyarakat dimana kita tinggal.

Seperti yang kita tahu, bahwa internet memiliki banyak sekali manfaat namun juga di saat yang sama, internet dapat membahayakan anak-anak. Untuk dapat membangun kebiasaan baik dalam menggunakan internet, perlu adanya pemahaman, dan kekompakan dari orang tua serta warga masyarakat. Di Dukuh Dawung, Desa Sawit, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pernah terjadi seorang anak yang mengalami

iritasi atau sakit matanya karena terlalu lama menatap layar *smartphone*. Oleh sebab itu, saya bersama tim pengabdian Universitas Amikom melakukan sosialisasi “Berinternet dengan Aman dan Sehat”. Kegiatan ini dilakukan di kediaman Ketua RT dan dihadiri oleh Ketua RW Sawit, Gantiwarno, Pengurus PKK serta sebagian anggota PKK Dukuh Dawung, Desa Sawit Gantiwarno., Klaten, Jawa Tengah. Pengabdian kepada masyarakat ini diketuai oleh diketuai oleh Kartika Sari Yudaningsih, S.I.Kom., M.A dengan Subektiningsih, S.Kom., M.Kom sebagai anggota tim.

Adapun metode pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini yaitu dilakukan dengan tatap muka terbatas serta membagikan tutorial penggunaan YouTube

Kids yang lebih aman dan dapat dikontrol penggunaannya oleh orang tua. Di akhir acara, peserta menyampaikan bahwa membutuhkan sosialisasi lanjutan dengan peserta anak-anak dan bapak-bapak, untuk dapat bersama-sama mengimplementasikan materi sosialisasi yang telah disampaikan oleh tim pengabdian masyarakat.

Program pengabdian masyarakat ini dilakukan secara terbatas, dihadiri oleh Ketua RW dan pengurus serta sebagian anggota PKK Dusun Dawung, Gantiwarno. Sosialisasi yang dilakukan secara langsung, serta membagikan flyer berupa tutorial YouTube Kids, dan juga berupa diskusi dan tanya jawab dengan peserta. (*)